

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era kontemporer yang ditandai dengan percepatan arus globalisasi dan disruptif teknologi pada abad ke-21, sistem pendidikan di berbagai negara dihadapkan pada tantangan fundamental untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki kapabilitas berpikir kritis (*critical thinking*), kolaborasi (*collaboration*), kreativitas (*creativity*), serta karakter demokratis yang kokoh. Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila membutuhkan lulusan yang mampu menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*), yakni individu yang memiliki kecintaan terhadap tanah air, mampu terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan kemasyarakatan, serta memiliki kompetensi menyelesaikan persoalan sosial-politik secara logis, arif, dan santun.

Urgensi pengembangan keterampilan tersebut diperkuat oleh proyeksi global. Laporan *World Economic Forum (WEF)* dalam *The Future of Jobs Report 2024* menegaskan bahwa kemampuan analisis berpikir kritis dan pemecahan masalah kompleks, serta kemampuan bekerja sama, konsisten menempati peringkat atas sebagai keterampilan inti yang paling dibutuhkan di pasar kerja masa depan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Hasil *Programme for International Student Assessment (PISA) 2022* yang diselenggarakan OECD menunjukkan bahwa kompetensi siswa Indonesia dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah masih berada di bawah rata-rata negara OECD.

Capaian ini mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam pendekatan pembelajaran yang kurang merangsang keterampilan kognitif tingkat tinggi, sehingga menuntut adanya transformasi mendasar dalam praktik pedagogik di kelas

Kondisi ironis ini tercermin jelas dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Idealnya, PPKn menjadi wahana strategis untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan melatih kecakapan sosial. Kenyataannya, praktik pembelajaran di lapangan masih didominasi oleh metode konvensional yang berpusat pada guru (teacher-centered).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat tahun 2023, sekitar 64% guru SMK masih mengandalkan metode ceramah dalam mengajar PPKn, sementara hanya 18% yang mengimplementasikan model pembelajaran berbasis kolaborasi. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian di berbagai SMK, di mana guru masih sering menggunakan metode ceramah yang belum mencapai hasil belajar yang diharapkan. Akibatnya, proses belajar gagal membangkitkan keterlibatan aktif siswa dalam merenungkan dan mendialogkan isu-isu sosial-politik aktual, sehingga pemahaman konseptual siswa rendah dan sikap demokratis tidak tumbuh secara organik.

Padahal, siswa SMK sebagai calon tenaga kerja profesional dan anggota masyarakat membutuhkan bekal soft skills yang memadai, karena dunia industri tidak hanya menuntut kompetensi teknis (hard skills), tetapi juga kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan memecahkan masalah. Fenomena kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini juga ditemukan secara spesifik di SMK Ma'arif Sukawening.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada bulan Januari 2025, pembelajaran PPKn di kelas XI masih didominasi oleh metode ceramah yang berpusat pada guru. Peserta didik cenderung pasif, jarang dilibatkan dalam diskusi kelompok, dan belum terbiasa menganalisis permasalahan sosial secara mandiri. Lebih jauh, pembelajaran PPKn di SMK seringkali kurang mendapatkan perhatian optimal karena fokus utama sekolah dan siswa tertuju pada mata pelajaran kejuruan.

Hal ini diperkuat oleh keterangan guru PPKn setempat (A, 2025) yang menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis kolaborasi belum pernah diterapkan secara terstruktur dalam proses pembelajaran PPKn di sekolah tersebut. Akibatnya, pemahaman konseptual peserta didik cenderung rendah dan sikap demokratis belum berkembang secara optimal. Padahal, pendidikan kewarganegaraan di SMK memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan kesadaran siswa sebagai warga negara yang tidak boleh diabaikan.

Kajian empiris telah banyak membuktikan efektivitas pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. (Slam, 2020) menemukan bahwa "penerapan model *Jigsaw* dapat meningkatkan kolaborasi dan partisipasi aktif dalam pembelajaran PPKn." (Yudis Setiawan, 2024) membuktikan bahwa "pembelajaran kolaboratif berdampak signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa SMK." Hal ini selaras dengan temuan penelitian terkini yang menunjukkan bahwa model pembelajaran seperti *Problem-Based Learning* (PBL) dan pendekatan kolaboratif dalam pendidikan vokasi (TVET) secara signifikan meningkatkan keterampilan komunikasi, kerja sama tim, dan pemecahan masalah.

(Maria Anggelita & Mariono, 2020) juga "menyoroti keterkaitan antara keterampilan kolaborasi dan kemampuan *problem solving* peserta didik." Di sisi lain, (Ni Ketut Sukadi, 2020) menunjukkan "pengaruh positif model kolaboratif terhadap sikap sosial dan hasil belajar siswa SD," serta (Aliza, 2020) menegaskan "kontribusi collaborative learning terhadap efikasi diri siswa dalam pembelajaran PPKn." Studi-studi lain turut memperkuat landasan teoritis ini. Penelitian tentang model kooperatif tipe *Number Head Together* (NHT) membuktikan bahwa metode ini efektif dalam membentuk karakter demokratis siswa SMK, yang ditandai dengan kesiapan belajar, kesungguhan berdiskusi, pengakuan terhadap keberagaman, dan pengembangan keterampilan sosial seperti menghargai pendapat orang lain .

Model *Think Pair Share* (TPS) juga terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang materi demokrasi, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta melatih komunikasi dan kerjasama . Lebih lanjut,

inovasi seperti pengembangan jobsheet berbasis *Collaborative Project-Based Learning (CPjBL)* di SMK menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kolaborasi aktif siswa melalui peran kelompok yang terdefinisi dan tanggung jawab bersama .

Pendekatan *Problem-Based Learning (PBL)* dalam PPKn pun diakui dapat memperkuat keterampilan kolaborasi dan berpikir kritis, yang merupakan fondasi penting bagi terbangunnya sikap demokratis. Meskipun berbagai penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan efektivitas pembelajaran kolaboratif pada berbagai ranah, sebagian besar fokusnya masih terbatas pada peningkatan aspek kognitif dan sosial seperti hasil belajar, efikasi diri, serta keterampilan kolaborasi itu sendiri. Kajian tentang bagaimana model pembelajaran kolaboratif dapat secara spesifik dan terukur digunakan untuk menumbuhkan sikap demokratis dalam konteks PPKn di jenjang SMK masih sangat terbatas.

Hal ini menjadi celah riset (research gap) yang signifikan. Selain itu, penelitian seperti (Thesia, 2020) yang berfokus "pada jenjang SMP, bukan SMK yang memiliki karakteristik pembelajaran dan kebutuhan berbeda," sementara (Khakim, 2020) meneliti "pengembangan sikap demokratis menggunakan inquiry learning, bukan pendekatan kolaboratif." Padahal, SMK memiliki kekhasan tersendiri karena merupakan lembaga pendidikan vokasi yang bertugas menyiapkan siswanya untuk siap langsung bekerja dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat industri yang majemuk .

Oleh karena itu, masih ada celah yang signifikan dalam penelitian mengenai keterkaitan langsung antara implementasi model pembelajaran kolaboratif, penguatan sikap demokratis, dan peningkatan kemampuan memecahkan masalah siswa SMK secara terintegrasi. Kemandirian dalam berpikir, kemampuan berargumentasi secara santun, serta sikap menghargai perbedaan dan musyawarah adalah kompetensi vital yang diperlukan dalam lingkungan sosial dan profesional. Model pembelajaran kolaboratif dipandang mampu menciptakan ekosistem belajar yang aktif dan dialogis, di mana siswa dapat saling bertukar pikiran, menghargai perbedaan, serta bekerja sama merumuskan solusi atas masalah yang diberikan.

Dengan demikian, penerapan model ini dalam pembelajaran PPKn berpotensi menjadi strategi pedagogis yang efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang demokrasi sekaligus kapasitas pemecahan masalah siswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dengan memperdalam pemahaman tentang efektivitas model pembelajaran kolaboratif dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di tingkat SMK, serta memperkaya khazanah teori belajar sosial-konstruktivistik. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru PPKn untuk merancang strategi pembelajaran inovatif yang berorientasi pada penguatan karakter demokratis dan kecakapan berpikir kritis abad ke-21.

Penelitian ini secara nyata membawa manfaat bagi para guru, sekolah, dan para pemangku kebijakan pendidikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru PPKn dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang lebih kreatif, partisipatif, dan berpusat pada siswa. Bagi pihak sekolah, penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang lebih mengedepankan penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi gotong royong dan bernalar kritis. Bagi para pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan empiris dalam merumuskan program penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan di SMK yang responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.

SMK Ma'arif Sukawening dipilih sebagai lokus penelitian karena merepresentasikan permasalahan riil dalam upaya pengembangan sikap demokratis dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Berdasarkan pengamatan awal tahun 2025, mayoritas siswa tampak kurang aktif dalam diskusi, enggan menyampaikan pendapat, dan masih menunjukkan kecenderungan individualistis dalam belajar. Guru PPKn di sekolah ini juga mengonfirmasi bahwa metode pengajaran yang digunakan selama ini masih berpusat pada ceramah dan penugasan individual, sehingga kurang memberikan ruang bagi tumbuhnya dinamika kelompok. Kondisi ini mengonfirmasi temuan bahwa pendidikan kewarganegaraan seringkali hanya menjadi formalitas kurikulum tanpa dipraktikkan secara nyata dalam keseharian

siswa di kelas . Hal ini menegaskan urgensi penerapan model pembelajaran kolaboratif sebagai alternatif inovatif untuk meningkatkan partisipasi aktif dan kesadaran demokratis siswa.

Implementasi model pembelajaran kolaboratif dalam pembelajaran PPKn sejalan dengan paradigma Kurikulum Merdeka yang mengedepankan kemandirian, gotong royong, dan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan abad ke-21 menuntut siswa untuk mampu berkolaborasi, memecahkan masalah kompleks, dan beradaptasi dengan perubahan. Berbagai model seperti TPS, NHT, atau PBL yang merupakan varian dari pembelajaran kolaboratif telah terbukti mampu mendorong partisipasi aktif siswa . Dengan demikian, riset ini tidak hanya relevan untuk kepentingan akademik, tetapi juga sejalan dengan visi kebijakan pendidikan nasional dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Implementasi model kolaboratif diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual bagi kehidupan siswa SMK sebagai bagian dari masyarakat dan dunia kerja. Berdasarkan keseluruhan pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana model pembelajaran kolaboratif diimplementasikan dalam meningkatkan sikap demokratis serta kemampuan pemecahan masalah siswa kelas XI SMK Ma'arif Sukawening.

Secara teoretis, hasil riset ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pendidikan, khususnya terkait pedagogi kewarganegaraan. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi panduan bagi guru PPKn dalam mendesain pembelajaran yang lebih efektif dan partisipatif, serta membantu sekolah dalam menciptakan iklim belajar yang demokratis dan kolaboratif di lingkungan pendidikan vokasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi tiga pokok permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan model pembelajaran kolaboratif dalam pembelajaran PPKn di SMK Ma'arif Sukawening belum optimal, karena proses belajar masih cenderung berpusat pada guru dan kurang melibatkan siswa secara aktif.
2. Sikap demokratis peserta didik masih rendah, yang ditandai dengan kurangnya keberanian dalam menyampaikan pendapat, rendahnya kemampuan bekerja sama, serta minimnya sikap saling menghargai perbedaan pendapat dalam proses pembelajaran PPKn.
3. Kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam pembelajaran PPKn masih tergolong rendah, yang ditandai dengan kesulitan peserta didik dalam menganalisis permasalahan sosial, kurangnya kemampuan berpikir kritis, serta rendahnya keberanian dalam mengusulkan solusi secara mandiri maupun dalam kelompok.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan model pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan sikap demokratis peserta didik dalam pembelajaran PPKn di kelas XI SMK Ma'arif Sukawening?
2. Apakah pelaksanaan model pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam pembelajaran PPKn di kelas XI SMK Ma'arif Sukawening?
3. Bagaimana hasil pretest dan posttest sikap demokratis serta kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam pembelajaran PPKn di kelas XI SMK Ma'arif Sukawening?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan model pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan sikap demokratis peserta didik dalam pembelajaran PPKn di kelas XI SMK Ma'arif Sukawening.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan model pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam pembelajaran PPKn di kelas XI SMK Ma'arif Sukawening.
3. Untuk mendeskripsikan hasil pretest dan posttest sikap demokratis serta kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam pembelajaran PPKn di kelas XI SMK Ma'arif Sukawening.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa membantu perkembangan pengetahuan di bidang pendidikan, terutama dalam menerapkan model pembelajaran kolaboratif pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu mengembangkan teori pembelajaran sosial-konstruktivistik yang memperkuat pentingnya berinteraksi dan bekerja sama dalam membangun pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas penelitian ilmiah mengenai hubungan antara pembelajaran kolaboratif, sikap demokratis, dan kemampuan berpikir kritis, yang belum banyak dikaji secara mendalam pada jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK). Oleh karena itu, hasil penelitian ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan konsep dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21, terutama dalam membentuk siswa yang mampu berpikir kritis, kreatif, serta memiliki karakter demokratis.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar.

Bagi guru PPKn, hasil penelitian ini bisa dipakai sebagai pedoman dalam menerapkan model pembelajaran kolaboratif yang lebih efektif, kreatif, dan berfokus pada siswa. Guru bisa menggunakan hasil penelitian ini untuk membuat aktivitas belajar yang mendorong siswa berpartisipasi aktif, melatih kemampuan berkolaborasi, serta membentuk nilai-nilai demokratis dalam kelas.

Bagi sekolah, penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam membuat kebijakan akademik dan meningkatkan kualitas belajar sesuai dengan semangat Merdeka Belajar. Sementara itu, bagi para siswa, penggunaan metode pembelajaran kolaboratif diharapkan dapat memperkuat kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keterampilan berinteraksi sosial, serta memperjelas pentingnya sikap demokratis dalam berperan dalam masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian lebih dalam tentang penerapan model pembelajaran kolaboratif dalam konteks pendidikan kewarganegaraan atau bidang-bidang lainnya. Untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini, berikut dikemukakan definisi operasional dari setiap istilah utama.

Pertama, model pembelajaran kolaboratif dalam penelitian ini didefinisikan sebagai model pembelajaran yang menempatkan peserta didik dalam kelompok kecil heterogen untuk bekerja sama menyelesaikan tugas, menganalisis masalah sosial, dan mempresentasikan hasil secara bersama. Model ini diterapkan secara terstruktur dalam pembelajaran PPKn kelas XI SMK Ma'arif Sukawening dengan mengikuti tahapan: pembentukan kelompok, pemberian tugas, diskusi kelompok, presentasi hasil, serta evaluasi dan refleksi.

Kedua, sikap demokratis dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kecenderungan perilaku peserta didik yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran, meliputi partisipasi aktif dalam diskusi, toleransi terhadap perbedaan pendapat, tanggung jawab terhadap keputusan kelompok, dan

kemampuan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Sikap demokratis diukur menggunakan lembar angket dengan skala Likert 1–5.

Ketiga, kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan persoalan kewarganegaraan secara sistematis, meliputi tahapan memahami masalah, merancang solusi, melaksanakan solusi, dan mengevaluasi hasil, sebagaimana dikemukakan oleh Polya (dalam Slavin, 2015:268). Kemampuan ini diukur melalui tes pilihan ganda sebanyak 30 butir soal berbasis studi kasus yang diberikan dalam bentuk pretest dan posttest.